

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA  
PENAGA KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2019**

Desroki Feliani<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Okparizan<sup>3</sup>

[desrokifeliani35@gmail.com](mailto:desrokifeliani35@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim  
Raja Ali Haji

**ABSTRACT**

*The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is government policy to independently assist the implementation of decent housing construction in a healthy and safe environment. The purpose was to evaluate the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) for Low-Income Communities (MBR) in Penaga Village. In dimension effectiveness, it has run optimally because the recipients of the aid have utilized the aid funds properly and the houses that have been completed have been turned into houses that are suitable for habitation. efficiency dimension does not efficiently because there are still several houses that have not completed and the construction not according to the target and is hampered because the community runs out of capital besides that the community is not enthusiastic to complete the construction according to the predetermined time. On adequacy dimension, funds channeled not sufficient to meet the needs of the community, especially for new developments that require more funds. Seen from dimension distribution of low-income people who receive assistance, it is quite even. On the responsiveness dimension, the community is very grateful. On the dimension of accuracy, it can be said that it is not quite right because there are people who receive assistance who do not match the criteria. The conclusion from the results of the researcher's analysis regarding the evaluation of the BSPS program in Penaga Village, Teluk Bintan District, is that in general the implementation of this program did not run optimally because there were still several houses that had not been 100% completed.*

**Keywords: Evaluation, Program, BSPS, MBR**

## I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan karena setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Rumah yang layak huni merupakan rumah dengan kriteria : struktur konstruksi memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan, jaringan air bersih, dan penyediaan septitank atau tempat pembuangan sanitasi yang berfungsi dengan baik dan aman serta tidak mencemarkan lingkungan.

Kementerian PUPR terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia melalui program BSPS atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Dalam kurun 4 tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkn rumah layak huni sebanyak 494.169 unit. Tahun 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 Triliun.

Landasan utama penyaluran dana bantuan program BSPS adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman pasal 54 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah dapat berupa stimulan rumah swadaya. Dengan adanya program BSPS ini mampu mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah yang layak huni.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimana prinsip BSPS berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Swadaya Masyarakat

Bantuan dari pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi aktif masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

c. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

Dapat dipertanggung jawabkan.

d. Dapat dipertanggung jawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat

e. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program BSPS, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB (Kelompok Penerima Bantuan) secara swadaya.

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten yang mendapat bantuan program BSPS sejak tahun 2016 lalu hingga tahun 2019. Namun untuk tahun 2017 Bintan tidak terdaftar sebagai penerima BSPS dikarenakan Kabupaten Bintan tidak mengajukan usulan ke kementerian.

No.	Nama Desa	Penerima Bantuan (KK)	Realisasi	Persentase	Belum Terealisasi	Persentase
1	Mantang Besar	104	99	95%	5	5%
2	Bintan Buyu	91	81	89%	10	11%
3	Pangkil	46	39	85%	7	15%
4	Dendun	41	41	100%	Selesai	-
5	Pengujan	23	21	91%	2	9%
6	Penaga	23	11	48%	12	52%
7	Tembeling	22	21	95%	1	5%
8	Teluk Sasah	9	9	100%	Selesai	-
<b>Total</b>		<b>359</b>	<b>322</b>	<b>97%</b>	<b>37</b>	<b>3%</b>

Sumber Data : Olahan Peneliti, 2020

Pada tahun 2019 bintang kembali mendapatkan bantuan dengan penerima bantuan sebanyak 8 Desa diantaranya; Mantang Besar, BintanBuyu, Dendun, Pangkil, Pengujan, TelukSasah, Tambeling dan Penaga. Terkhusus untuk Desa Penaga masuk sebagai desa penerima bantuan dimulai sejak September 2019 sebagai desa susulan sehingga untuk saat ini pembangunan di Desa Penaga masih belum bisa terealisasi 100 persen sedangkan tujuh desa lainnya dimulai sejak April 2019.

Berdasarkan keputusan PPK No.004/KPTS/PPKRSW.SNVT-PP/2019 Desa Penaga masuk sebagai desa penerima bantuan program BSPS tahun 2019 dan adapun temuan untuk saat ini pembangunan rumah di Desa Penaga baru terealisasi 48 persen di mana surat keputusan pembangunannya sudah dimulai sejak September 2019 dan target penyelesaian pembangunan sampai dengan 23 Desember 2019 yang artinya pembangunan tidak sesuai target.

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang evaluasi terhadap pelaksanaan program BSPS di Desa Penaga tahun 2019. Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi.

Peneliti memfokuskan penelitian pada evaluasi Program BSPS di Desa Penaga Tahun 2019. Dalam rangka mendukung keberhasilan program dalam memberikan bantuan untuk memenuhi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga diperlukannya evaluasi pelaksanaan

program untuk melihat apakah tercapainya tujuan dan manfaat program serta berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Variabel penelitian ialah Evaluasi yang menggunakan enam Indikator yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (Sugiyono, 2010) sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan
- b. Penelitian lapangan memperoleh data atau melakukan informasi langsung dari responden dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :Observasi, Wawancara, Dokumentasi,

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Skunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian dan Data sekunder merupakan data yang berasal dari survei lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku, Data sekunder merupakan data yang berasal dari survei lapangan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang secara faktual. (Moleong, 2014) adapun narasumber yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini adalah:

NO	Informan	Uraian	Jumlah
1	Kaurtek Swadaya SNVT Provinsi	Untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan pelaksanaan program BSPS	1 Orang
2	Sekretaris Desa	Untuk mengetahui proses seleksi data BNBA	1 Orang
3	Tenaga Fasilitator Lapangan	Untuk mengetahui bagaimana pengawasan/pendampingan TFL	1 Orang
4	Kelompok Penerima Bantuan BPS	Untuk mengetahui informasi pelaksanaan program	3 Orang
5	Masyarakat bukan penerima bantuan	Untuk mendapatkan informasi pelaksanaan selaku tetangga yang mengetahui kehidupan penerima bantuan	2 Orang
<b>Jumlah Informan</b>			<b>8 Orang</b>

Sumber: Data olahan peneliti,2020

### III. Hasil dan Pembahasan

Program ini sudah terlaksana dengan baik dimana dana bantuan yang disalurkan berupa bahan yang sampai ke masyarakat telah sesuai dengan yang disepakati yaitu 15.000.000 untuk bahan dan 2.500.000 untuk upah tukang. Selain itu, TFL Desa Penaga juga telah memberikan pendampingan rutin kepada masyarakat sehingga bahan bangunan yang sampai kemasyarakat sesuai dengan yang dipesan berbeda pada penelitian Anderson dkk, dengan judul pelaksanaan

BSPS dikecamatan Amurung timur Kabupaten Minahasa tahun 2019 tidak terlaksana dengan baik dimana keterlambatan pelaksanaan pembangunan disebabkan karena suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan penerima bantuan bahkan harga bangunan yang tiba-tiba naik.

Penelitian BSPS di Desa Penaga kurang optimal karena tidak sesuai dengan prinsip BSPS dimana masih terdapat masyarakat yang melakukan pembangunan rumah secara individu (tukang), kurangnya perhatian pemerintah desa dan ditambah dengan beberapa kendala lainnya berbeda dengan penelitian Laila Sari Anda dengan judul Pelaksanaan program BSPS di Sumberarum Moyudan Sleman pada tahun 2018 proses pelaksanaan berjalan dengan baik, ditambah dengan dukungan sumberdaya manusia yang cukup baik yaitu pengawasan yang dilakukakn oleh para aktor pemerintah Desa Sumberarum dan fasilitator dalam menjalankan tugasnya selain itu pembangunan yang dilakukan di Desa Sumberarum dilakukan secara gotong royong dan partisipasi/antusiasme masyarakat cukup tinggi sehingga mampu terselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan olah Ratih Setyo Rini yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian kegiatan BSPS Kementrian PUPR tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 100% kegiatan pembangunan terselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat penggunaan karena kordinasi dan komunikasi yang baik antar pelaksana BSPS yaitu Tim Teknis, Koordinator Fasilitator, TFL sedangkan penelitian di Desa Penaga ini belum berjalan lancar dimana masih ada penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria dan waktu penyelesaian pembangunan masih terbilang lambat dikarenakan masyarakat yang apatis dalam mencapai target penyelesaian yang juga disebabkan karena kekurangan modal sehingga pembangunan rumah terhambat. Meskipun penelitian ini belum se-optimal dengan penelitian BSPS sebelumnya namun penelitian yang sudah berhasil atau optimal bisa dijadikan sebagai acuan agar program BSPS mendatang bisa se-optimal penelitian sebelumnya.

#### **IV. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil analisis peneliti mengenai evaluasi program BSPS di Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan, yaitu bahwa secara umum pelaksanaan program ini tidak berjalan maksimal dikarenakan masih ada beberapa rumah yang belum terselesaikan 100 persen. Hasil evaluasi program BSPS di Desa Penaga Kecamatan Bintan didasarkan pada 6 indikator diantaranya:

*Pertama*, jika dilihat dari dimensi Efektifitas program BSPS sudah bisa dikatakan efektif dibandingkan dengan program bantuan rumah yang lain. Dapat dilihat dari bagusnya kualitas rumah yang telah selesai dan untuk sistem penyaluran bantuan juga lebih efektif karena bukan berupa uang namun bahan bangunan yang disesuaikan dengan jumlah dana yang ditetapkan selain itu dapat dilihat dari ketatnya kriteria/syarat penerima bantuan yang tertera di petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS.

*Kedua*, pada dimensi efisiensi dapat dikatakan belum efisien, dimana masih ada rumah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Jika dilihat dari segi waktu pembangunan telah terhambat disebabkan masyarakat yang kurang meluangkan waktu untuk pembangunan rumahnya sendiri sampai dengan kekurangan modal pembangunan sehingga tidak mencapai target penyelesaian pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, Dana bantuan berupa barang dan upah tukang yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya yaitu sejumlah 17.500.000.

*Ketiga*, pada dimensi kecukupan, bahan-bahan yang sampai kemasyarakat belum cukup memenuhi kebutuhan pembangunan sampai pada tahap selesai terkendala karena masyarakat yang telah kehabisan dana dan rumah yang belum bisa untuk ditempati. Selain itu Desa Penaga merupakan Desa susulan sehingga target penyelesaian pembangunan mengikuti Desa-Desa yang lain sedangkan desa yang lain telah berjalan 3 bulan sebelumnya.

*Keempat*, pada dimensi pemerataan untuk penentuan penerima bantuan secara keseluruhan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan dana yang diberikan kemasyarakat sudah merata artinya sama dengan anggota kelompok penerima bantuan yang lain.

*Kelima*, pada dimensi responsivitas masyarakat sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan program BSPS dan masyarakat sangat puas dengan pendampingan yang diberikan oleh tenaga fasilitator dimana TFL telah memberikan perhatian yang cukup baik, komunikasi yang rutin kepada masyarakat serta cepat tanggapnya TFL ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

*Keenam*, Pada dimensi ketepatan program ini belum berjalan dengan baik ditandai dengan adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan yaitu masyarakat yang memiliki fasilitas mewah (Mobil dan Motor).

Berdasarkan dimensi evaluasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Penaga dapat disimpulkan bahwa terdapat pelaksanaan dimensi yang sudah tercapai dan ada beberapa dimensi yang kurang tercapai.

## **V. Daftar Referensi**

### **Sumber Buku:**

Abdul Kahar dan Yuwono, B. (2002). *Kebijakan Publik, Konsep dan strategi*. Semarang:Undip Press.

Abu, A. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta:Rineka Cipta.

Arikunto.(2009a). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Edisi Revisi). Jakarta:Bumi Aksara.

Arikunto, S. dan C. S. A. J. (2009b). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gajah Mada University.

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik berbasis dynamic policy analisis*. Yogyakarta:Gava Media.

Laila Sari Ananda, A. P. (2018). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberarum Moyudan Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebiakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

Wirawan. (2015). *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia*. Jakarta:Salemba Empat.

### **Sumber Jurnal:**

Anderson Mamangkey, Johny Lumolos, F. P. (2019). *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019*.

Herman, M., Fibriyanita, F., Daya, S., Birokrasi, S., Stimulan, B., & Swadaya, P. (2019).

*Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( Mbr ) Di Kelurahan Pelaihari.*

Laila Sari Ananda, A. P. (2018). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sumberarum Moyudan Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Rini, R. S. dan P. K. B. S. P. S. K. P. 2017 di P. K. B. (2017). *Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementrian PUPR 2017 di Provinsi Kalimantan Barat.*

Tama, S. B. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).*

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :**

UUD RI Tahun 1945 pasal 28H Amandemen Ke- IV

UUD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 54 Ayat (3) huruf b

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya

Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya